

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Organisasi ataupun perusahaan membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tepat untuk mengerjakan tugasnya. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia adalah hal penting yang perlu dilaksanakan dengan baik supaya target organisasi bisa tercapai secara maksimal. Untuk meningkatkan kapabilitas setiap sumber daya manusia maka diperlukan suatu sistem manajemen yang baik dan dapat memahami kondisi SDM maupun memahami potensi organisasi yang dapat diberdayakan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kualitas dan kompetensi SDM sangat berpengaruh terhadap daya saing dan produktivitas organisasi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan perubahan dinamika pasar menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan instansi.

Namun, masih banyak perusahaan yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kompetensi SDM mereka. Beberapa faktor seperti kurangnya program pelatihan, minimnya akses terhadap pendidikan berkelanjutan, serta resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama dalam pengembangan kompetensi karyawan. Selain itu, pendekatan konvensional dalam pengelolaan SDM sering kali belum mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang pesat.

Peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pelatihan berbasis teknologi, pengembangan soft skill dan hard skill, serta pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Dengan adanya program peningkatan kompetensi yang efektif, diharapkan SDM dapat memiliki keterampilan yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan daya saing di pasar global.

Di era desentralisasi ini dimungkinkan bahwa budaya pelayanan yang buruk masih ada dalam tubuh birokrasi di daerah ini. Pelaksanaan pelayanan memunculkan penyimpangan-penyimpangan yang telah berkembang macam dan jenisnya. Hal ini disebabkan semakin banyaknya diskresi yang diberikan kepada daerah. Citra pelayanan yang buruk juga terjadi pada institusi pelayanan kesehatan di tingkat daerah.

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut :

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu pelayanan pada kantor kecamatan yang berada di suatu pemerintahan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai 2 urusan pemerintahan

yakni urusan wajib: ketahanan pangan dan urusan pilihan: perikanan. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Tugas Kepala Dinas ialah “Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Izin Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) diberlakukan untuk PSAT yang dikemas dan/atau dilabel oleh pelaku usaha menengah dan kecil pada pelaku usaha yang melakukan pencampuran PSAT-PDUK dengan PSAT-PL. PSAT-PDUK dikecualikan untuk PSAT-PDUK yang dibungkus dalam keasan eceran dihadapan pembeli, PSAT-PDUK yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku industri pengolahan bahan baku industri pengolahan pangan yang produk akhirnya memerlukan izin edar lainnya dan PSAT yang masa simpannya kurang dari 7 hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan tidak berisiko tinggi.

Berdasarkan pengamatan penulis sementara pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik pada kantor DKPP ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM DKPP terhadap kualitas pelayanan PSAT-PDUK di Kabupaten Cirebon yang kompeten;
2. Sarana dan prasarana pengujian yang belum memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan mengambil topik peningkatan kompetensi SDM, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peningkatan Kompetensi SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Terhadap Kualitas Pelayanan PSAT-PDUK di Kabupaten Cirebon”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peningkatan kompetensi SDM DKPP Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana kualitas pelayanan PSAT-PDUK di Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana pengaruh peningkatan kompetensi SDM DKPP terhadap tingkat pelayanan PSAT-PDUK di Kabupaten Cirebon?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi kemudian membahas bagaimana peningkatan kompetensi SDM DKPP dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan PSAT-PDUK di Kabupaten Cirebon.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan:

- a. Mengetahui tingkat kompetensi SDM DKPP Kabupaten Cirebon.
- b. Mengetahui kualitas pelayanan PSAT-PDUK di Kabupaten Cirebon.
- c. Mengetahui pengaruh peningkatan kompetensi SDM DKPP terhadap tingkat pelayanan PSAT-PDUK di Kabupaten Cirebon.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk:

1. Aspek keilmuan, diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam tentang pengaruh kompetensi SDM pada peningkatan pelayanan publik, dan juga hasil kajian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara/Publik.
2. Dilihat dari aspek praktis, diharapkan menjadi bahan masukan dalam menyusun dan meningkatkan kapasitas SDM DKPP sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan PSAT-PDUK di Kabupaten Cirebon.
3. Dari aspek akademis, sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara/Publik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon tahun akademik 2025/2026 sekaligus dapat bermanfaat bagi bahan referensi penelitian selanjutnya.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian adalah Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Jl. Sunan Drajat No.17 Sumber, Cirebon, Jawa Barat 45611.

1.5.2. Waktu Penelitian

Adapun lamanya penelitian adalah selama lebih kurang 5 (lima) bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Persiapan penelitian dan studi kepustakaan pengajuan ijin penelitian dan

seminar selama satu bulan.

2. Penelitian lapangan dilakukan selama satu bulan.
3. Pengolahan dan penyusunan Skripsi selama satu bulan.

Untuk lebih jelasnya kegiatan penelitian tersebut penulis membuat perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Jadual Penelitian Tahun 2025

No.	KEGIATAN	BULAN					KET
		FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
1.	Studi Kepustakaan, ijin penelitian						Persiapan awal
2.	Pembuatan Proposal dan Seminar Proposal						Penyusunan dan Pembuatan Power Point
3.	Pengumpulan data Lapangan						Penyebaran Angket, Wawancara
4.	Pengolahan data, Penyusunan Skripsi						Penyusunan, Analisis data, Bimbingan
5.	Penyusunan Skripsi, Sidang Skripsi						Bimbingan dan Pembuatan Power Point